

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Turki merupakan sebuah negara yang dianugerahi dengan kondisi geografi yang unik. Hal tersebut dikarenakan, wilayah geografis Turki berada di sebagian benua Asia (Semenanjung Anatolia) dan benua Eropa (Daerah Balkan) yang dipisahkan oleh Laut Marmara, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Selain itu, Turki berbatasan langsung dengan Laut Aega dan Yunani di bagian barat; Laut Hitam di bagian utara; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di bagian Timur; dan Laut Mediterania di bagian selatan (Rofii, 2019). Luas wilayah Turki yaitu 769.630 Km² dengan total penduduk per tahun 2019 ini mencapai angka 83.7 juta orang (Wordometers, 2019).

Turki menjadi salah satu negara yang memiliki saksi peradaban sejarah yang menarik, yaitu dengan lahirnya peradaban Kekaisaran Byzantium, Kerajaan Turki Utsmani, sampai peradaban Turki moderen yang sekuler. Kerajaan Islam Turki Utsmani, memimpin Turki dari tahun 1281 sampai 1924 M, yang menjadikan Turki menjadi kekhalifahan atau kempemimpinan terakhir umat Islam. Kemudian pada 1924, dengan runtuhnya Turki Utsmani, Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal Ataturk yang menjadi Turki sebagai negara republik konstitusional yang demokratis, moderen, dan sekuler (Britannica, 2019).

Pada saat ini, Turki dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dari AK Parti setelah berhasil memenangkan konstetasi pemilu nasional di Turki untuk yang kedua kalinya pada 2018 yang lalu. Selama masa pemerintahan Presiden Erdogan dari tahun 2014 sampai saat ini, membuat Turki menjadi aktor dengan kekuatan baru yang tidak hanya sukses dalam urusan membenahi domestik negaranya, namun juga ikut aktif terlibat dalam isu-isu kawasan maupun internasional, salah satunya adalah keterlibatan dalam *Arab Sping* (Rofii, 2019).

Arab Sping merupakan suatu fenomena dimana terdapat banyak konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah pada tahun 2011, dimulai dari pergolakan politik, perang antar etnis, intervensi asing yang membawa kepentingan nasionalnya serta negara-negara berpengaruh yang ikut campur dalam urusan politik domestik negara-negara di Timur Tengah dengan maksud ingin menumbangkan rezim yang berkuasa menjadikan wilayah Timur Tengah. Fenomena ini mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan domestik negara-negara di Timur Tengah yang salah satunya adalah Suriah. Suriah menjadi salah satu negara yang terdampak dari pergolakan politik Arab Spring akibat pengaruh negara dan kelompok-kelompok kepentingan yang masuk ke dalam wilayah Suriah. Akibatnya negara ini mengalami perang saudara yang mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal (Syafitri, 2017).

Perang saudara di Suriah dimulai dari aksi protes warga sipil Suriah terhadap penangkapan pelajar di kota kecil Daara dan aksi protes yang ditanggapi dengan anarkis oleh pemerintah. Akibatnya, reaksi ini justru mengundang konflik yang lebih luas dan efek dari kejadian ini mengawali munculnya pemberontakan di

wilayah Suriah dari kelompok-kelompok militan dan oposisi Pemerintah Suriah (Martini, York, & Young, 2013).

Masyarakat domestik Suriah telah terbagi menjadi dua. Beberapa mendukung Pemerintah Suriah dan yang lain menjadi kelompok militan yang menjadi oposisi pemerintah. Perang yang terjadi mengakibatkan ketidakstabilan keamanan di Suriah sehingga memaksa para warga untuk mengungsi ke wilayah yang aman. Terhitung sejak April 2014, sekitar 6,5 juta warga Suriah telah meninggalkan kediaman mereka akibat perang yang terjadi (Syafitri, 2017). Kemudian, sekitar 10% dari populasi penduduk Suriah juga telah mengungsi ke negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan dan mengamankan diri dari perang yang terjadi. Salah satu negara yang dituju oleh para pengungsi Suriah yaitu Turki.

Selain itu, munculnya kelompok teroris PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*) di Suriah, membuat suasana *Arab Spring* semakin memanas. Kelompok teroris tersebut telah memberikan ancaman kepada dunia internasional terutama Pemerintah Turki selama lebih dari 30 tahun dan bertanggung jawab terhadap kematian lebih dari 40.000 warga sipil (Anadolu Agency, 18 Oktober 2019).

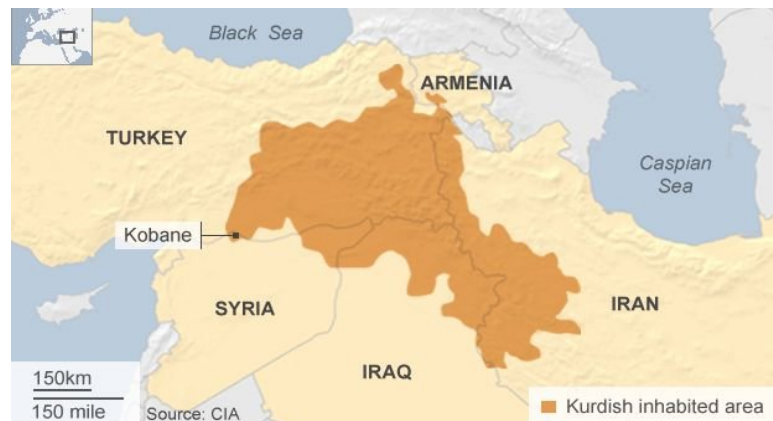
PKK atau Partai Buruh Kurdi, merupakan sebuah organisasi militan yang didirikan oleh Abdullah Ocalan pada tahun 1978 untuk mendirikan negara Kurdi Merdeka (BBC, 2019). Konflik antara Pemerintah Turki dengan Bangsa Kurdistan, bermula sejak masa pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk Ataturk. Ataturk menjanjikan kepada Bangsa Kurdistan kemerdekaan dan dapat menempati wilayah yang mereka tempati (Turki Tenggara), namun janji tersebut tidak ditepati karena

Ataturk dengan sosok nasionalisnya, ingin menasionalisasikan Turki di bawah kepemimpinannya. Dengan demikian, Pemerintah Turki pada saat itu membatasi hak-hak warga Kurdi di Turki seperti melarang penggunaan bahasa Kurdi, dan tidak memberikan wilayah sebagai tanah air Bangsa Kurdistan untuk memerdekakan diri seperti yang telah dijanjikan oleh Ataturk (Merdeka, 2018).

Sejak tahun 1984 sampai sekarang, hubungan antara kedua pihak masih belum bisa diselesaikan dengan baik walaupun konflik antar kedua belah pihak telah memakan jumlah korban yang cukup banyak. Bangsa Kurdi menginginkan perubahan dalam terutama dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya mereka terima demi mengubah nasib mereka terutama tuntutan mereka mengenai pemberian status wilayah otonom dari Pemerintah Turki. Namun, Pemerintah Turki justru melihat tuntutan tersebut sebagai sebuah ancaman dalam berbagai bidang terutama terhadap keamanan negara Turki dan harus ditindaklanjuti (Handayani & Bachri, 2012).

Kelompok tersebut saat ini tersebar di berbagai negara seperti Turki bagian tenggara, Suriah, dan bermarkas di Irak Utara. Dalam perkembangannya, kelompok PKK terus menebar ancaman dan tindakan-tindakan anarkis yang mengganggu keamanan dan stabilitas. Sehingga PKK menjadi perhatian banyak masyarakat internasional, yang pada akhirnya dilabeli oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai kelompok teroris Internasional (U.S. Department of State, 2019).

Gambar 1. 1: Peta Persebaran Etnis Kurdi



Terdapat berbagai macam aksi teror yang dilakukan oleh PKK kepada dunia Internasional seperti contoh aksi bom bunuh diri di berbagai lokasi umum, melakukan kontak senjata, penculikan terhadap warga sipil, dan berbagai peristiwa lainnya yang menimbulkan dampak kerusakan. Alasan PKK melakukan aksi teror tersebut tidak hanya ingin mengkampanyekan dan mendirikan Negara Sosialis Kurdistan, melainkan menunjukkan kekuatan (*show force*) kepada dunia Internasional untuk mendapatkan pengakuan (Panut, 2017).

Selain itu, kelompok teroris PKK menggunakan anak-anak sebagai militan dalam menjalankan aksi kejahatannya sejak 2013. Dari laporan PBB, terdapat 46 militan anak yang tergabung dalam kelompok PKK. Jumlah tersebut terus meningkat sampai tahun 2017 yang mana militan anak berjumlah 224, dan saat ini meningkat menjadi 313 anak (Anadolu Agency, 23 Oktober 2019). Terdapat sebanyak 40% militan anak adalah perempuan dan 20 diantaranya berumur di bawah 15 tahun (Anadolu Agency, 28 Juli 2019).

Meskipun Pemerintah Turki telah berulang kali berkonfrontasi dengan kelompok teroris PKK sejak tahun 1984, namun baru-baru ini Pemerintah Turki

melancarkan lagi operasi militer di perbatasan Turki-Suriah, tepatnya di Suriah bagian utara. Operasi militer itu diberi nama *Operation Piece Spring*. Alasan mengapa Pemerintah Turki akhirnya memutuskan untuk mengambil kebijakan/keputusan menyerang kelompok teroris PKK di Suriah Utara, akan dijelaskan dalam tulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian topik ini yaitu, “**Apa Kepentingan Nasional Pemerintah Turki Dalam *Operation Piece Spring* di Suriah Tahun 2019?**”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui mengenai kepentingan nasional Pemerintah Turki terhadap pengungsi Suriah di Turki;
2. Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai faktor-faktor Pemerintah Turki melakukan *operation peace spring* terhadap teroris PKK di Suriah Utara tahun 2019;
3. Untuk memperkaya kajian Hubungan Internasional terutama dalam mata kuliah Hubungan Internasional di Timur Tengah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan teori baru dalam Hubungan Internasional (HI) yang muncul pada akhir tahun 1997 sebagai hasil dari konferensi

internasional para ahli HI diberbagai negara yang dilaksanakan di Kora Aarhus-Norsminde, Denmark (Bakry, 2017). Pendekatan ini muncul dikarenakan kegagalan para sarjana HI dalam menjelaskan dan memprediksikan berakhirnya Perang Dingin—yang terkesan mendadak—berdasarkan teori-teori yang ada pada saat itu khususnya neo-realisme dan neo-liberalisme.

Munculnya konstruktivisme dalam HI membuat studi HI tidak hanya terfokus pada masalah isu *High-Politics* saja melainkan juga membuka peluang untuk menjelaskan fenomena *Low-Politics* seperti masalah isu gender dan etnisitas yang selama ini terabaikan. Kaum konstruktivis menekankan sebuah perspektif antropologis dan sosiologis mengenai politik internasional yang berupa norma, peran identitas dalam proses pembentukan tindakan dan kepentingan, serta hubungan timbal balik antara “agen” dan “struktur” (Price & Reus-Smit, 1998).

Sebagai pendekatan baru yang hadir dalam studi HI, konstruktivisme memiliki perbedaan asumsi dengan neo-realisme dan neo-liberalisme, dimana teori ini menekankan pada dimensi sosial dalam HI, kemungkinan perubahan dunia internasional, dan mengutamakan penekanan pada variabel-variabel non-material seperti norma, kebudayaan, identitas, dan gagasan untuk memberikan penjelasan terhadap perilaku aktor dalam HI (Bakry, 2017).

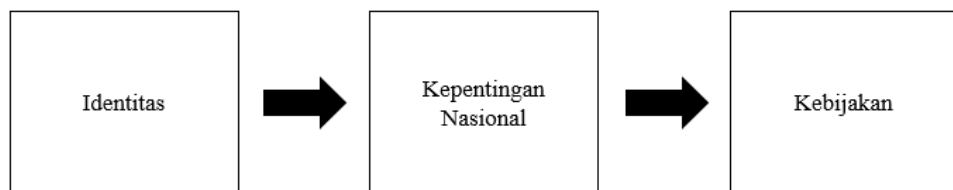
Konstruktivisme juga biasa dikenal dengan konstruktivis sosial yang memberikan penekanan terhadap pentingnya faktor ide (gagasan), bagaimana cara setiap negara melakukan ‘konstruksi’ mengenai realitas sosial dalam HI dan dari hasil konstruksi tersebut mereka akan bertindak. Sehingga pembentukan konstruksi dunia sosial yang berasal dari manusia (aktor) tidak bersifat *given*, dan merupakan sesuatu yang berada di luar (*out there*) dari penelitian ilmiah dan penjelasan teoritis mengenai hukum-hukumnya. Konstruktivisme beranggapan bahwa dunia sosial bersifat intersubjektif, dikarenakan hal tersebut memberikan makna bagi manusia yang mengkonstruksi secara kontekstual, memahami, dan hidup didalamnya. Dengan demikian, dunia sosial yang didalamnya terdapat unsur HI, tidak bersifat tetap melainkan terus berubah sesuai dengan pemahaman yang sama setiap aktor (Bakry, 2017).

Fakta sosial merupakan hasil dari konstruksi—buatan—manusia yang eksistensinya tergantung pada tindakan manusia itu sendiri. Begitu juga dengan fakta mengenai fenomena atau isu dalam HI yang merupakan hasil/output dari konstruksi manusia dan tergantung pada tindakan manusia itu. Sehingga sistem internasional tidak bersifat *given* namun dapat diubah dari pemahaman masing-masing aktor. Konstruktivisme melihat para aktor dalam sistem internasional sebagaimana yang berada di lingkungan mereka, yang memengaruhi dan mengubah mereka. Dengan demikian, perilaku negara-negara dalam HI dibentuk dari berbagai faktor yang dikonstruksi

secara sosial seperti misalnya identitas sikap dan keyakinan para *decision maker* (Wendt, 1992).

Menurut Alexander Wendt, konstruktivisme merupakan teori struktural yang memiliki asumsi, yaitu (1) negara merupakan aktor utama dalam HI dan unit analisa dalam teori politik internasional; (2) struktur utama dalam sistem internasional sifatnya intersubjektif, bukan material seperti neo-realis dan neo-liberal; dan (3) identitas dan kepentingan negara dibangun berdasarkan ‘konstruksi’ sosial yang mereka bangun, dan tidak bersifat *given*. Dari ketiga poin diatas, maka suatu negara akan membentuk gagasan/ide dalam memahami fenomena HI berdasarkan struktur di tempat mereka saling melakukan interaksi satu sama lain, serta bertindak berdasarkan anggapan konstruksi yang mereka ciptakan (Bakry, 2017).

Gambar 1. 2: Proses Pembuatan Kebijakan dalam Teori Konstruktivis Alexander Wendt



Selain itu, teori konstruktivis dibangun berdasarkan empat asumsi menurut Joseph Grieco, yaitu (1) suatu bentuk kepentingan baik itu individu, kelompok, maupun negara tidak bersifat *given*, melainkan terbentuk dari identitas para aktor dan bagaimana orang lain melihat para aktor tersebut; (2) faktor ide/gagasan—budaya, ilmu pengetahuan, agama, dan keyakinan normatif— sebagai pembentuk identitas; (3) elit individu baik dalam suatu

negara menjadi aktor yang paling penting untuk memengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat di suatu negara dalam sistem internasional; dan (4) peran komunikasi atau interaksi antar elit dengan jaringan tempat dimana mereka beroperasi dalam rangka pembentukan dan perubahan identitas demi memperkuat gagasan dan keyakinan (Grieco, Ikenberry, & Mastanduno, 2015).

Dari penjelasan di atas mengenai konstruktivisme, dapat dipahami bahwa fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional (HI), merupakan hasil dari konstruksi manusia dalam memandang dunia Internasional dan tidak bersifat *given*. Proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh para aktor HI menurut pendekatan konstruktivis, justru disebabkan oleh kepentingan nasional yang dilatarbelakangi oleh identitasnya masing-masing. Seperti contoh ketika Pemerintah Turki memilih untuk melakukan operasi militer di perbatasan Turki-Suriah, dapat ditelusuri dari identitas dan latar belakang Pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan sebagai pemimpin muslim yang peduli terhadap saudara muslim dunia.

Selain itu, identitas semangat nilai perjuangan Neo-Ottomanisme menjadi salah satu identitas Pemerintah Turki dalam menentukan kepentingan nasionalnya. Istilah Neo-Ottomanisme pertama kali dikenalkan oleh menteri luar negeri Turki, Ahmed Davutoglu dalam bukunya yang berjudul *Stratejik Derinlik* atau Strategi Mendalam. Neo-Ottomanisme Turki pada masa pemerintahan rezim AK Parti, memperkenalkan konsep *zero*

problem with neighbors yaitu menghindari segala permasalahan atau konflik dengan negara tetangganya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penafsiran ulang terhadap politik luar negeri Turki yang sebelumnya tertutup menjadi lebih terbuka. Munculnya istilah Neo-Ottomanisme sebagai bentuk harapan bagi pemerintah Turki untuk menafsirkan sejarah kebesaran Kekaisaran Turki Utsmani yang mana mampu menyebarkan pengaruhnya ke seluruh belahan dunia. Dengan adanya semangat tersebut, maka akan membantu Turki dalam menyebarkan pergerakan dan pengaruhnya di dunia internasional. Salah satu bentuk penyebaran pengaruh pemerintah Turki dalam politik luar negerinya adalah adanya kepentingan Turki dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah dan melindungi serta menciptakan kondisi lingkungan yang aman bagi para pengungsi Suriah yang datang ke Turki (Hidayati, 2018).

2. Konsep Kepentingan Nasional

Salah satu konsep yang masih menjadi pembahasan sentral dan fokus utama dalam studi HI, yaitu konsep kepentingan nasional. Konsep tersebut berfungsi sebagai *key explanatory tool* dalam memahami dan menjelaskan berbagai fenomena HI, terutama dalam bidang diplomasi dan politik luar negeri. Hal tersebut dikarenakan, konsep kepentingan nasional merupakan salah satu determinan utama yang menyebabkan banyak negara menjalankan hubungan internasional (Bakry, 2017). Berdasarkan pendapat dari Theodore Coulombis dan James Wolfe (1990), peran konsep kepentingan nasional

masih sangat dibutuhkan dan penting untuk memberikan penjelasan, deskripsi, prediksi, atau preskripsi mengenai perilaku Internasional.

Makna dari konsep kepentingan nasional memiliki banyak pendapat, salah satunya yang paling terkenal adalah pendapat milik Hans J. Morgenthau, yang dikenal sebagai “bapak” realis dalam studi HI. Dalam teori politik luar negeri dan politik internasional nya yang beraliran realis, konsep *power* dan kepentingan nasional menjadi pilar dalam teori tersebut, dimana setiap negara berusaha untuk mendapatkan *power* demi memenuhi tujuan dari kepentingan nasionalnya (Mas'oeed, 1990). Pemikiran tersebut berlandaskan pada premis dimana kepentingan nasional harus menjadi dasar yang digunakan dalam berdiplomasi, dan bukan didasarkan oleh alasan ideologi, moral, dan legal yang sifatnya utopis dan berbahaya (Bakry, 2017).

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional memiliki dua tingkatan yaitu kepentingan nasional primer dan sekunder. Kepentingan nasional primer yaitu kemampuan suatu negara untuk melindungi identitas fisik, budaya, politik, dan keamanan negara tersebut dari gangguan atau ancaman negara lain (Bakry, 2017). Maksudnya adalah, dalam hal ini suatu negara harus dan wajib mempertahankan integritas wilayah (identitas fisik), rezim ekonomi-politik (identitas politik) dengan berbagai macam ideologinya, dan memelihara norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan yang terdapat di dalam suatu negara-bangsa (identitas budaya) (Mas'oeed, 1990). Sedangkan kepentingan nasional sekunder yaitu suatu bentuk kepentingan negara yang dapat diupayakan atau dikompromikan dengan negara lain melalui negosiasi.

Dari penjelasan konsep kepentingan nasional di atas, dapat diaplikasikan dalam pembahasan skripsi ini, dimana Pemerintah Turki memiliki kepentingan nasionalnya baik terhadap Negara Suriah dan kelompok teroris PKK. Disatu sisi, Pemerintah Turki memiliki kepentingan nasional di Suriah terutama Suriah bagian utara dan juga terhadap para pengungsi Suriah di Turki. Sementara di sisi yang lain, Pemerintah Turki juga memiliki kepentingan nasionalnya terhadap ancaman dari kelompok teroris PKK. Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesa dalam skripsi ini, maka penulis memilih untuk menggunakan konsep kepentingan nasional.

E. Hipotesis

Kepentingan nasional Pemerintah Turki dalam *Operation Peace Spring* di Suriah Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Turki dengan semangat Neo-Ottomanisme nya menjadikan Turki sebagai “pemimpin” bagi dunia Islam dalam kebijakan luar negerinya. Selain itu, Pemerintah Turki juga berupaya untuk menciptakan “zona aman” bagi para pengungsi Suriah, sehingga para pengungsi Suriah yang mengungsi di Turki, dapat kembali ke negara asalnya dengan aman;
2. Pemerintah Turki melakukan operasi militer di Utara Suriah sebagai upaya mengatasi ancaman kelompok teroris PKK yang menguasai wilayah tersebut dan berusaha untuk melindungi kedaulatan wilayah Turki.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada tulisan ini berfokus pada penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Turki terhadap para pengungsi Suriah di Turki pada masa Presiden Erdogan (2014-sekarang). Setelah itu, penelitian ini membahas mengenai alasan Pemerintah Turki melakukan operasi militer di Suriah bagian utara di tahun 2019 ini.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau kualitatif. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi tentang alasan Pemerintah Turki menerima, melindungi, dan memfasilitasi para pengungsi Suriah, dan menganalisa mengenai alasan Pemerintah Turki melakukan operasi militer di Suriah Utara.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *library reseach*, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, berita, internet dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II akan membahas mengenai sejarah perkembangan peradaban di Turki terutama dalam bidang politik dari zaman kekhalifahan Turki Utsmani sampai Turki Modern di bawah pimpinan Presiden Erdogan saat ini;

BAB III akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya konflik di Suriah dan kepentingan Turki di Suriah;

BAB IV yang merupakan isi dari penelitian ini, akan menjelaskan mengenai alasan Pemerintah Turki menerima pengungsi Suriah dan melakukan operasi militer terhadap kelompok teroris PKK di Suriah Utara tahun 2019;

BAB V akan membahas kesimpulan dari penelitian ini, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah di atas.